

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. salah satu kegiatan masyarakat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perdagangan. Perdagangan tidak hanya berlaku bagi antar individu disuatu negara, namun juga antar individu di negara-negara yang berbeda serta antar negara yang satu dengan negara yang lain yang disebut perdagangan internasional. Untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan dengan baik maka masyarakat internasional membentuk instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan WTO atau ( *World Trade Organization* ). WTO merupakan bentuk forum kerjasama multilateral yang terbentuk sejak tahun 1995 dan saat ini terdiri dari 160 negara anggota. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah negara- negara besar di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT). Saat ini, WTO menjadi forum negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang sudah dimulai dari tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Prinsip pembentukan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) yaitu mengharuskan pemerintah memperlakukan semua negara, investasi dan perusahaan asing secara sama dari segi hukum,dan perlakuan non-

diskriminasi diantara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya.

Terkait DDA, (*Doha Development Agenda*), KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan (Indonesia 2013, hlm.1). Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs (*Least Developed Countries*) atau negara kurang berkembang, untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu yang dibahas mencakup kesembilan belas isu dalam kerangka DDA yaitu pertanian yang terdiri dari tiga elemen yakni akses pasar, subsidi ekspor, dan dukungan domestik atau subsidi domestik, jasa, akses pasar untuk produk non-pertanian, Trade-related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS), hubungan antara perdagangan dan investasi, hubungan antara perdagangan dan kebijakan persaingan, transparansi dalam government procurement, fasilitasi perdagangan, ketentuan anti-dumping dan subsidi, ketentuan terkait perjanjian perdagangan regional, pengertian atas penyelesaian sengketa, perdagangan dan lingkungan, e-commerce, Small Economies, perdagangan, hutang dan pembiayaan, perdagangan dan alih teknologi, kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, negara kurang berkembang, Special and Differential Treatment (Tabloid Diplomasi No.72 2013, hlm. 8).

Dalam perkembangannya, Perundingan Putaran Doha yang dimulai sejak tahun 2001 tidak berjalan dengan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding diantara negara-negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA (*Non-Agricultural Market Access*). Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan "*suspension*" pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA, dan menggunakan isu-isu single-undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong

kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, Pejabat Tinggi, dan Tingkat Menteri, baik dalam format terbatas (plurilateral dan bilateral) maupun multilateral. Sampai pada Target Program Kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 (sembilan) Komite/*Negotiating Groups* diharapkan mengeluarkan “*final texts*” atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking Putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket Putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan Putaran Doha selesai (ditandatangani) akhir tahun 2011. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada (Indonesia 2013, hlm.1).

Posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian *development objectives* dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Bagi negara maju isu fasilitasi perdagangan merupakan isu yang penting bagi negara maju untuk dibahas karena menyangkut kepentingan nasional negara maju, sedangkan isu pembangunan berkaitan dengan dasar pembentukan DDA yang tujuan utamanya adalah untuk mengedepankan pembangunan negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang (Indonesia 2014, hlm.1).

Berakhirnya KTM 8 yang dilaksanakan di Jenewa, memberikan dorongan bagi Indonesia untuk membuat rumusan isu untuk dipersiapkan pada konferensi tingkat menteri WTO ke-9, yang mana Indonesia merupakan tuan rumah dalam KTM ke-9 tersebut. Pembahasan rumusan tersebut dilakukan Indonesia akhirnya dengan mengemas Bali package sebagai isu yang akan dibahas. Isu yang dibahas di Bali Package meliputi, isu pertanian, isu fasilitasi perdagangan, dan isu

pembangunan, ketiga isu ini diambil karena adanya progress untuk memajukan Agenda Doha. bagi Indonesia bali package mempunyai arti penting karena jika Bali Package dapat diloloskan dalam pertemuan KTM ke-9 WTO, Indonesia akan mendapat keuntungan disetiap isu meliputi Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) yaitu melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Pertanian (*Agriculture*) yang mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu *public stockholding for food security*. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di forum *Dispute Settlement Body*-WTO, dan Pembangunan (*Development*)/ LDC's (*Least Development Countries*) yang terdiri dari preferensi ketentuan asal barang, operasionalisasi kemudahan akses pasar jasa, akses pasar *duty free, quota free/ DFQF*, dan mekanisme monitoring penerapan S&D. Hal ini juga ditekankan oleh Menteri perdagangan Gita Wirjawan dalam siaran pers kemendag 2013 menjelang KTM WTO ke-9 yang mengatakan bahwa Konferensi Tingkat Menteri di Bali adalah puncak dari salah satu periode negosiasi paling intens di Jenewa sejak peluncuran Agenda Pembangunan Doha 12 tahun yang lalu. Sukses di Bali sangat penting dan keberhasilan KTM WTO ke-9 di Bali ini dapat menghidupkan kembali Agenda Pembangunan Doha yang selama ini mengalami kebuntuan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang berarti. Oleh sebab itu, mari sukseskan KTM ke-9 di Bali (Siaran pers kemendag 2013, hlm.1).

Hingga pada desember 2013 di KTM ke-9 WTO mencapai kesepakatan bersama yaitu *Bali Package* (Paket Bali). Keberhasilan ini terjadi tentunya tidak lepas dari peran Indonesia, Sebelumnya Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar bali Package berhasil disepakati. Salah satunya melakukan diplomasi dengan beberapa negara yang juga mempunyai pengaruh besar didalam forum WTO, yaitu pada tanggal 5 Desember 2013, Indonesia dan Jepang yang diwakili

oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Wakil Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Midori Matsushima telah melakukan pertemuan bilateral (Tabloid Kemenlu 2014, hlm. 13).

Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengharapkan peran dan dukungan Jepang untuk membantu kelancaran dalam upaya pencapaian Paket Bali. Paket Bali merupakan pilar penting perdagangan multilateral yang akan mendukung peningkatan perdagangan internasional baik di negara berkembang maupun di negara maju, dan Jepang menegaskan akan memainkan peran diplomasinya serta mendukung sepenuhnya keberhasilan Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Bali.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Maka rumusan masalah yang diangkat terkait latar belakang tersebut yaitu *bagaimana Diplomasi Indonesia dalam pencapaian kesepakatan Bali Package di KTM WTO ke 9 pada tahun 2013 di Bali?*

## **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kegagalan perundingan yang terjadi selama pertemuan KTM WTO dibawah putaran *Doha Development Agenda* hingga tercapainya *Bali Package*
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis arti penting *Bali Package* dalam sistem perdagangan multilateral serta melihat upaya yang dilakukan Indonesia melalui diplomasi dalam mencapai kesepakatan *Bali Package* di KTM WTO ke-9.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan ilmu hubungan internasional untuk memperkaya wawasan mengenai bali package dalam pertemuan KTM WTO ke-9 tahun 2013 di bali yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa hubungan internasional dalam melengkapi karya tulisnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai

perkembangan perundingan di WTO serta diplomasi Indonesia dalam mencapai kesepakatan *Bali Package* untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

### **I.5 Tinjauan Pustaka**

Indonesia merupakan negara berkembang yang ingin meningkatkan pembangunan negaranya agar bisa mensejahterahkan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan adalah ikut terlibat dalam organisasi perdagangan internasional yaitu WTO (World Trade Organization). WTO bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia melalui kerjasama perdagangan multilateral. Saat ini WTO dibawah perjanjian baru yaitu Doha Development Agenda yang sudah dimulai dari tahun 2001 mencakup 19 isu. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Dari tahun 2001 DDA mengalami *deadlock*. Hingga pada akhirnya di KTM ke-9 di Bali Indonesia berupaya untuk meloloskan *Bali Package* dengan tujuan mengedepankan pembangunan negara berkembang dan kurang berkembang. Sehingga pada akhirnya KTM WTO ke-9 berhasil menyepakati *Bali Package* sebagai hasil dari sebagian perundingan DDA dan hal ini mengatasi kebuntuan perundingan putaran Doha sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga penelitian yang pernah ada untuk disajikan sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan Keberhasilan Indonesia dalam meloloskan Bali Package di KTM WTO ke-9 tahun 2013. Berikut merupakan beberapa referensi penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Noor Afif Fauzi yang menganalisis bahwa perundingan baru DDA di WTO ini sebagai pertarungan antara Negara maju dan Negara berkembang yang mana berimbang pada tidak tercapainya kesepakatan konsensus antar Negara anggota. dan hal ini membuat citra WTO dipertanyakan relevansinya. Penelitian tersebut juga menganalisis bagaimana peran Negara berkembang untuk mengambil posisi didalam perundingan putaran Doha hingga pada perundingan Bali package. Penelitian yang ditulis oleh Noor yang berjudul "*Kuasa dan Pemajuan Kepentingan Negara Berkembang di WTO*". Didalam penelitiannya tersebut Noor sebagai penulis ingin menjelaskan upaya

pemajuan kepentingan Negara berkembang di WTO yang berguna untuk memperbaiki pemosisian Negara berkembang agar kedepannya peran yang dimainkan serta manfaat yang diraih menjadi lebih baik, yang mana jika dilihat dari sisi politis maupun teknis Negara maju memiliki kuasa yang lebih kuat dibandingkan Negara berkembang. Hal ini terjadi karena Negara maju mempunyai kapasitas yang lebih baik. Noor juga menjelaskan bahwa keberadaan sistem demokratis yang transparan, inklusif, serta berbasis konsensus jika dimanfaatkan dengan baik maka akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kepentingan negara berkembang. Didalam Pelaksanaan KTM IX Bali menjadi momentum yang tepat guna merefleksikan kembali keberlanjutan perdagangan multilateral yang selama ini stagnan pada deadlock perundingan Putaran Doha, sekaligus mengupayakan cara yang lebih baik untuk memenuhi rasa keadilan bagi Negara berkembang.

Upaya penyelesaian perundingan Putaran Doha sendiri merupakan persoalan yang cukup rumit. Dalam penelitiannya dituliskan Paul Collier menulis dalam *Why The Wto Is Deadlocked: And What Can Be Done About It (2005)*, setidaknya terdapat tiga persoalan mengapa perundingan ini berjalan begitu rumit. Pertama, terdapat perbedaan mendasar antar anggota WTO sehingga jika dilakukan pertukaran konsesi yang terjadi bisa jadi akan merugikan salah satu pihak. Negara berkembang menginginkan konsesi berupa transfer agar ada manfaat langsung yang mereka dapatkan. Contoh dari transfer ini seperti bantuan teknis atau perlakuan khusus dan berbeda. Kedua, terdapat kelompok negara terutama negara berkembang di WTO yang menganggap bahwa mereka telah cukup termarginalisasi dari perekonomian dunia sehingga tidak memiliki dasar bargaining untuk kepentingan bersama. Padahal, sistem konsesus yang dianut mengharuskan semua negara untuk menyepakati perundingan yang disepakati. Dan ketiga, meskipun terdapat negara berkembang yang masih memiliki bargaining dalam forum perundingan, namun tetap saja sulit untuk mencapai kesepakatan seperti pada era GATT karena kesepakatan yang diputuskan terlalu lintas sektoral sehingga jika ditransformasi dalam aturan domestik negara membutuhkan adaptasi yang banyak dari beragam aturan yang telah ada.

Persoalan-persoalan ini belum ditambah faktor negara *free rider* yang bisa saja membuyarkan strategi serta peta koalisi yang ada.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah fokus pembahasan penelitian Noor mencoba untuk menjelaskan bagaimana posisi Negara berkembang untuk diupayakan mengalami peningkatan dalam perundingan putaran Doha agar bisa mengalahkan posisi Negara maju yang lebih dominan selama proses perundingan putaran Doha. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada upaya apa yang dilakukakn Indonesia dalam pencapaian kesepakatan *Bali Package* setelah adanya masa Agenda Doha yang mengalami kebuntuan sejak di deklrasikan tahun 2001, melalui *Multitrack Trade Diplomacy* sejak berakhirnya KTM WTO ke 11 di Jenewa.

Selanjutnya , penelitian yang ditulis oleh Nafan Aji Gusta Utama dengan judul “*Diplomasi Indonesia dalam Perundingan Doha Development Agenda – WTO; Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian*”. Nafan yang membahas mengenai kepentingan Indonesia dan perannya didalam Perundingan *Doha Development Agenda* dari tahun 2001 sampai tahun 2009, yang mana penjelasan tersebut berfokus untuk menganalisis dinamika perundingan DDA WTO hingga pada kesiapan Indonesia dalam KTM ke-9. Nafan menjelaskan bagaimana tujuan perundingan Doha yang sebenarnya untuk mencapai pembangunan ekonomi. *Doha Ministerial Declaration* (Deklarasi Menteri/Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru di WTO mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, HAKI, penyelesaian sengketa dan peraturan WTO. Deklarasi tersebut juga mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi terciptanya konsensus mengenai *Singapore Issues* yang mencakup isu-isu investasi, kebijakan kompetisi (*competition policy*), transparansi dalam pengadaan pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. deklarasi tersebut juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai *electronic commerce*, negara-negara kecil (*small economies*), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi. Adapun Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan

dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiation Committee/TNC*) dan badan-badan di bawahnya (*subsidiaries body*). Selibhnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh *Councils* dan *Committees* yang ada di WTO. Selain itu, perundingan Doha dicapai kesepakatan yang dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA). Hal ini mengingat di dalamnya terdapat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*), seperti kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara kurang berkembang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO. Jika dikaitkan dengan posisi Indonesia selama Perundingan DDA, Indonesia berupaya untuk berfokus pada bagaimana memperkuat konsolidasi aliansi negara-negara berkembang dalam menghadapi perundingan *Doha Development Agenda* WTO selanjutnya. Penelitian ini menjelaskan perkembangan putaran DDA dan melihat kegagalan yang terjadi dalam perundingan *Doha Development Agenda* yang mengalami kebuntuan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu dalam penelitian Nafan, menjelaskan pada dinamika perundingan DDA yang dimulai dari tahun 2001-2009 dengan melihat isu pertanian sebagai salah satu isu yang bermasalah antara negara maju dan negara berkembang yang ada di dalam putaran Doha. Dan juga menganalisis peran Indonesia mengenai keterlibatannya dalam perundingan DDA khususnya dalam isu pertanian. Sementara pada penelitian saya lebih mengarah kepada apa saja yang dilakukan Indonesia setelah KTM ke-8 di Jenewa 2011 menuju KTM ke-9 dalam keberhasilan *Bali Package* yang dilaksanakan di Bali 2013.

Kemudian penelitian yang berjudul "*Efektivitas Kebijakan WTO bagi Indonesia*" yang ditulis oleh Pebriyani Hardiyanti. Didalam penilitiannya tersebut Pebriyani menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam organisasi WTO memberikan beberapa manfaat yaitu untuk menghindari tindakan unilateral negara ekonomi kuat, memperkarakan praktek yang tidak sesuai dengan persetujuan WTO dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa, membuka peluang produk ekspor Indonesia dengan liberalisasi perdagangan yang

dipromosikan WTO, adanya aturan main yang jelas dalam praktek perdagangan internasional, adanya transparansi peraturan, serta perlakuan khusus yang berbeda bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu Pebriyani melihat bahwa Kebijakan WTO juga telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang melalui berbagai ketentuan yang disebut *Special and Differential Treatment* (S&D).

Kebijakan S&D adalah hak-hak khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, serta membantu negara berkembang mengatasi kesulitan pengimplementasian seluruh perjanjian WTO. Sehingga diharapkan kepentingan pertumbuhan dan pembangunan negara berkembang tidak terhambat. Selain itu, S&D menunjukkan bahwa dengan perbedaan tingkat pembangunan yang dicapai oleh negara anggota memerlukan adanya perangkat-perangkat kebijakan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbeda pula.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu Pebriyani lebih memfokuskan penjelasan mengenai kepentingan Indonesia dalam keterlibatannya bergabung menjadi anggota WTO, dan melihat bagaimana perkembangan posisi Indonesia selama bergabung di perundingan Doha Development Agenda. Dengan melihat apakah WTO benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia atau tidak. Sedangkan penelitian saya membahas tentang seberapa penting *Bali Package* bagi Indonesia sehingga Indonesia berupaya untuk meloloskan *Bali Package*

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Diplomasi**

Menurut Sumaryo, diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya (Suryokusumo 1995, hlm. 1-2).

Menurut Harold Nicloson , salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad ke 20 mengatakan bahwa terdapat lima hal

dalam diplomasi yaitu Politik luar negeri, Negosiasi, Mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, Mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional (Roy 2008, hlm.5).

Teori diplomasi merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional antar negara yang melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum (Plano & Olton 1982, hlm.24).

Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.

Dalam mempelajari diplomasi pada umumnya harus ditinjau hubungan antar negara dan politik luar negerinya, sehingga hubungan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain (Plano & Olton 1982, hlm 24)

Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara. Dalam diplomasi tingkat tinggi, dilakukan pertahapan yang biasanya dilakukan oleh actor negara yang diwakili oleh para kepala negara yang dilakukan secara langsung dalam sebuah forum diskusi dengan aktivitas berupa penukaran ide atau gagasan. Namun seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam perkembangannya maka secara umum hubungan diplomatik saat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui tahapan-tahapan yakni pengiriman utusan berupa duta ataupun perwakilan-perwakilan yang dikirim oleh negaranya (Feiltham 1998, hlm.45).

Disamping itu dengan tujuan diplomasi sebagai pengamanan kepentingan negara sendiri. Kepentingan negara tersebut seperti dalam hal pemeliharaan keamanan, memajukan ekonomi, serta perdagangan internasional, hingga pada

perlindungan warga negara sendiri di negara lain. Untuk mencapai tujuan diplomasi tersebut, tentu setiap negara membutuhkan beberapa aspek yaitu kerja sama, penyesuaian, dan penentangan. Dalam hal ini, kerjasama dan penentangan dapat dengan mudah dicapai dengan menggunakan jalur negosiasi yang pada akhirnya bermuara pada sebuah hasil. Jika negosiasi tidak efektif adanya dalam mencapai tujuan diplomasi, maka *opposition* dapat menjadi alternatif selanjutnya. Atau dengan kata lain, jika negosiasi tidak berhasil maka perang adalah jalan alternatifnya.

Diplomasi pada dasarnya adalah sebuah "seni berunding atau seni bernegosiasi", sedangkan dalam arti luas, pengertian diplomasi adalah keseluruhan kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Pejabat yang menjalankan proses diplomasi disebut sebagai seorang diplomat. Diplomasi bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang dilakukan dengan negara tertentu saja/antara dua negara, sedangkan diplomasi multilateral adalah diplomasi yang dilakukan dengan banyak negara. Diplomasi mencakup berbagai kegiatan, seperti; menetapkan tujuan yang akan dicapai, mengerahkan semua sumber untuk mencapai tujuan, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan Nasional, menentukan apakah tujuan Nasional sejalan dengan kepentingan nasional negara lain dan menggunakan sarana yang tersedia dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang serba mengetahui hubungan antara berbagai negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, dari prinsip-prinsip hukum antar negara (*Internasional Law*), dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan Internasional (Jusuf Badri, hlm. 20).

Hubungan Internasional saat ini membutuhkan suatu pemahaman lebih terhadap arti dari pada diplomasi atau dengan kata lain mendefinisikan kembali arti atau makna definisi diplomasi setiap negara. Diplomasi kini telah berkembang, yang mulanya diplomasi tradisional kini diplomasi menjadi diplomasi multilevel. Diplomasi multilevel terdiri dari beberapa tingkat (*level*), yaitu diplomasi secara bilateral, regional dan multilateral.

Nicholas Bayne, mendefinisikan bahwa diplomasi ekonomi adalah:

*“ as the method by which states conduct their external economic relations. It embraces how they make decisions domestically, how they negotiate internationally and how the two processes interact.”*

Yaitu diplomasi ekonomi sebagai "sebuah metode dimana negara melakukan hubungan ekonomi eksternal mereka. Ini mencakup bagaimana mereka membuat keputusan dalam negeri, bagaimana mereka melakukan negosiasi internasional dan bagaimana kedua proses berinteraksi (Djelantik 2008, hlm.130)

Pada dasarnya proses diplomasi professional secara bilateral akan membantu proses penyelesaian sengketa anatar negara secara lebih intens, namun kini diplomasi secara multilateral lebih banyak digunakan oleh negara-negara di dunia karena banyaknya Perundingan ataupun konferensi-konferensi yang dibentuk oleh negara-negara yang ada di dunia baik negara berkembang ataupun maju, sehingga proses diplomasi multilateral sudah banyak di gunakan.

Diplomasi konferensi berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral. Poin ini mengandung dua aspek (Sukawarsini Djelantik, hlm 133-145) :

- a. Konferensi multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah-masalah diluar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama, khususnya pada konferensi internasional seperti PBB. Selain itu, memberi nilai khusus bagi negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.
- b. Mediator yang memiliki kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan konferensi multilateral sebagai upaya memulai negosiasi bilateral untuk membahas masalah-masalah mendasar yang sebelumnya diselenggarakan di tempat lain.

Barry Fulton mengusulkan agar pelaksanaan diplomasi ditinjau kembali agar dapat mengikuti perubahan-perubahan global yang terjadi. Diplomasi pada era modern dapat dilaksanakan tidak hanya oleh Departemen Luar Negeri, akan tetapi juga oleh kegiatan perdagangan, pertanian, dan organisasi-organisasi lainnya yang terkait dengan masalah-masalah internasional dan untuk menerapkan manajemen perubahan (Sukawarsini Djelantik, hlm 17). Sebagai tambahan,

diplomasi juga melibatkan lebih banyak diplomat-diplomat dari kalangan warga negara biasa melalui aktivitas diplomasi jalur kedua. Dengan semakin berkembangnya kegiatan diplomasi, terdapat beberapa jalur yang digunakan dalam upaya diplomasi yang dilakukan, yaitu:

a. *First track diplomacy*:

Aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi ini yaitu aktor negara seperti antara pemerintah ke pada pemerintah dalam suatu negara. Dalam diplomasi ini, para aktor-aktor diplomasi pertama, melakukan kegiatan berdasarkan pada kekuasaan dan sifat kaku dalam menjalankan interaksi resmi antara wakil-wakil yang telah diberi intruksi oleh negara yang berdaulat, telah dipengaruhi secara luar biasa oleh aktor-aktor dalam diplomasi jalur kedua. Upaya-upaya diplomasi melalui jalur pertama (pemerintah kepada pemerintah) biasanya gagal dalam menyelesaikan akar permasalahan dari sebuah konflik. Karena kegagalan tersebut, jalur kedua (atau diplomasi antar warga negara) harus dikembangkan sebagai salah satu cara alternatif untuk menangani akar permasalahan dari konflik-konflik antar negara.

b. *Second track diplomacy*:

Terdiri atas kelompok-kelompok kepentingan ekonomi melalui sumber daya, lingkungan, kemanusiaan, kriminal dan kepentingan pemerintahan global. Aktor non-negara ini saling berinteraksi dengan rekan-rekannya di negara lain sehingga mampu mempengaruhi, memberi masukan, membentuk dan mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri. Menurut McDonald, upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur kedua ini jangan dianggap sebagai pengganti upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur pertama, tetapi harus dipandang sebagai pendukung yang dapat melengkapi kegiatan mereka. Secara idela, upaya-upaya pada diplomasi jalur ini harus membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi pemerintah untuk mengakui dan mmepergunakan informasi-informasi penting dan cara pandang yang dimiliki oleh diplomat-diplomat jalur kedua.

c. *Multi track diplomacy*

Karena adanya perbedaan upaya-upaya diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*), diplomasi tersebut lebih lanjut berkembang menjadi *multi track diplomacy*. Idealnya, setiap diplomasi harus saling mendukung dari segi keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. Sehingga ke lima jalur dapat bekerjasama untuk tujuan membangun fondasi kekuatan yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi upaya-upaya *first track diplomacy* (Sukawarsini Djelantik, hlm 19-21). *Multi track diplomacy* semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktor di luar negara dalam praktik diplomasi. Diplomasi ini kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada *jalur pertama*, dan pada *jalur kedua* terdapat LSM *Non Governmental Organization*(NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa dan warga negara biasa. Unsur aktor dalam diplomasi ini menjalankan persahabatan internasional dan perdamaian dunia (Moehammad Soelhi, hlm 82-84).

Terkait dengan perundingan DDA yang tidak mencapai kesepakatan secara konsesus, Indonesia membuat suatu upaya untuk meloloskan *Bali Package* yang merupakan sebagian dari isu DDA dan dirumuskan di KTM WTO ke-9, melalui pendekatan yang mengarah kepada *Multitrack Diplomacy* yakni diplomasi yang dilakukan baik secara bilateral, regional, dan multilateral hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan memberikan jalan keluar dari keberlanjutan *Doha Development Agenda*. Jika dihubungkan pada penelitian ini dimana, diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui multijalur ini merupakan strategi untuk mencapai kesepakatan *Bali Package*, dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam forum multilateral WTO melibatkan banyak actor, sehingga perlu adanya usaha dari segala jalur diplomasi untuk dapat merundingkan dan menyepakati perjanjian secara bersama, mengingat pengambilan keputusan pada Agenda Pembangunan Doha yang mengalami *deadlock* harus mengambil kesepakatan dengan sistem *Single Undertaking* yaitu tidak ada kesepakatan jika tidak ada kata sepakat dari seluruh anggota WTO.

### **I.6.2 Konsep Doha Development Agenda**

Doha Development Agenda merupakan putaran perundingan baru WTO yang dimulai sejak tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat dan memperbaiki aturan WTO saat ini agar lebih adil dan menjawab kepentingan pembangunan negara berkembang dan LDCs (Negara Berkembang Terbelakang). Selain itu, tujuan dari Putaran DOHA adalah merundingkan tambahan akses pasar global, *Most Favoured Nation* (MFN) yaitu prinsip memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang dari negara-negara anggota WTO, melalui penghapusan atau pengurangan hambatan tariff dan non-tarif, subsidi domestik dan subsidi ekspor. Doha Development Agenda membahas isu perundingan baru yang meliputi perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, HAKI, penyelesaian sengketa *Singapore Issues* yang mencakup isu-isu investasi, kebijakan kompetisi (*competition policy*), transparansi dalam pengadaan pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. Selain itu DDA merundingkan program-program kerja mengenai *electronic commerce*, negara-negara kecil (*small economies*), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi. Di dalam DDA (Doha Development Agenda) terdapat juga isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*), seperti kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara kurang berkembang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO (Tabloid Diplomasi Kemenlu No.72, hal 8).

### **1.6.3 Konsep Bali Package**

Bali Package merupakan sebagian isu perundingan yang ada didalam *Doha Development Agenda* yang meliputi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, beberapa isu di bawah perundingan sector pertanian (yaitu menyangkut penambahan "*general services*" yang dibebaskan dari ketentuan pembatasan subsidi, *public stockholding for food security purposes*, pengertian mengenai administrasi *tariff-rate quota* dari perjanjian pertanian, dan persaingan ekspor/subsidi ekspor), serta isu-isu pembangunan dan negara kurang berkembang (terdiri dari preferensi Ketentuan Asal Barang, operasionalisasi kemudahan akses

pasar jasa, akses pasar *duty free, quota free/ DFQF*, dan mekanisme monitoring penerapan S&D). Isu-isu yang dibahas tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Tabloid Kemenlu. No.72 hal. 9):

a. Fasilitasi perdagangan

Melalui perjanjian ini, negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit sehingga kegiatan perdagangan dunia dapat menjadi semakin cepat, mudah, dan murah. Isi dari fasilitasi perdagangan berkaitan dengan prinsip WTO yaitu Most Favored Nation. Prinsip ini adalah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap negara anggota WTO atau penduduknya dalam pemberian fasilitas perdagangan. Hal ini akan memperlancar arus barang lintas batas dengan mengurangi waktu, biaya dan ketidakpastian administrasi dalam proses.

b. Agrikultur

Isi perjanjian ini menyangkut pembentukan stok pangan dalam rangka ketahanan pangan dalam penanganan sementara sampai solusi permanen selesai dirundingkan dalam empat tahun ke depan. Yang mana negara berkembang akan dibebaskan dari tuntutan disiplin apabila subsidi dari total output melampaui 10% sesuai batasan dalam Perjanjian Pertanian yang ada saat ini. Fleksibilitas baru pada pertanian akan meningkatkan kehidupan petani di negara-negara berkembang, mempromosikan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

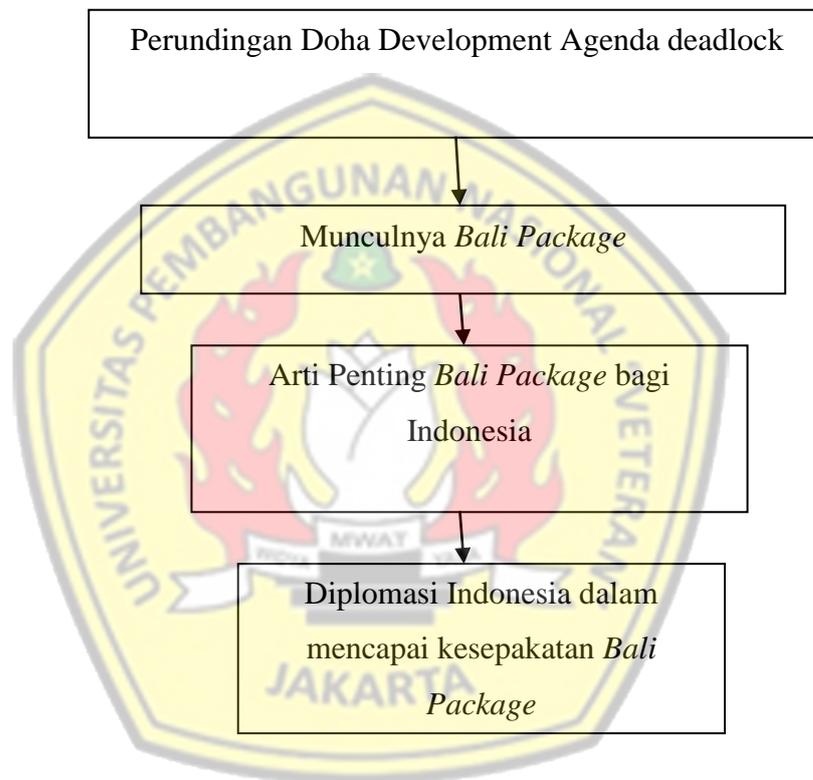
c. Pembangunan

Isi dalam perjanjian ini yaitu perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari Negara kurang berkembang, *Duty-Free and Quota-Free (DFQF)* untuk negara kurang berkembang, dan mekanisme pengawasan *Special and Differential Treatment* terhadap negara kurang berkembang. Hasil pembangunan akan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang untuk memaksimalkan hasil dari perdagangan.

*Bali package* merupakan “*stepping stone*” yang menghasilkan “*small but credible package of deliverables*” untuk mengatasi kebuntuan Perundingan

Putaran Doha sesuai mandat KTM ke-8. Kesepakatan di Bali mewakili kurang dari 10% Doha Development Agenda namun tetap dipandang penting untuk menghidupkan kembali momentum perundingan Doha (Kemendag, Rapat Terbatas, hlm.3). Paket Bali atau *Bali Package* merupakan langkah besar yang positif bagi system perdagangan multilateral, yang belakangan ini mulai terkikis oleh inisiatif kerjasama bilateral dan regional yang dilakukan negara-negara.

### I.7 Alur Pemikiran



### I.8 Asumsi

- a. Perundingan putaran baru WTO yaitu *Doha Development Agenda* yang mengalami *deadlock* dari DDA yang terbentuk tahun 2001 hingga 2011 disebabkan oleh proses runding yang saling bertolak belakang antara Negara Berkembang dan Negara Maju. Hingga KTM ke-9 baru berhasil mencapai kesepakatan secara konsensus
- b. Keberhasilan *Bali Package* di KTM ke-9 WTO di Bali merupakan *stepping stone* atau batu loncatan untuk pergerakan melanjutkan dan menyelesaikan putaran Doha selanjutnya.

- c. Upaya yang dilakukan Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan dalam meloloskan Bali package memperlihatkan bahwa peran Indonesia sebagai negara berkembang mampu menjadi *Bridge Builder* dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum kerjasama multilateral tersebut.

## **I.9 Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini melihat bagaimana peran Indonesia dalam mencapai kesepakatan pada *Bali Package* di KTM WTO ke-9 di Bali guna meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Periode penelitian ini dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2013. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna menjawab permasalahan yang terjadi.

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Nana Syaodih, hlm 60). Metode kualitatif juga merupakan metode yang memberikan sebuah penjelasan dari sebuah peristiwa atau fenomena yang hadir di lingkungan sosial sekitar. Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Data Primer Wawancara dengan pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Bpk. Boris Situmorang, selaku Kasubdit Tinjauan Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi Direktorat Kerja Sama Multilateral Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI dan Bpk. Angga Handian Putra selaku Kepala Seksi Aturan Perdagangan Direktorat Kerja Sama Multilateral Dirjen Kerja

Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI. Selain itu, menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Dokumen Resmi World Trade Organization (WTO).

Data Sekunder melalui studi dengan jurnal-jurnal yang menjelaskan WTO, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, laporan Kementerian Perdagangan dan Laporan dari kementerian luar negeri serta surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian toritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional (Kajian Pustaka 2012, hlm.1).

Data wawancara yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI, akan digunakan sebagai data utama dalam penulisan BAB II dan BAB III. Secara keseluruhan data primer berupa wawancara beserta dokumen resmi yang didapat mengenai bali package dan keberhasilan Indonesia meloloskan bali package, dan berikut data sekunder berupa bahan-bahan tertulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Kementerian Perdagangan dan juga perpustakaan FISIP UPN "Veteran" Jakarta, akan digunakan untuk membedah isu dalam penulisan. Data-data tersebut juga akan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan di dalam penelitian.

### **I.10 Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penulis untuk memahami alur pemikiran, maka penelitian ini di bagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II KEPENTINGAN INDONESIA DI PERUNDINGAN DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN BALI PACKAGE

Bab ini akan membahas mengenai dinamika perundingan DDA (Doha Development Agenda) DDA hingga pada perundingan di KTM ke-9.

## BAB III DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENCAPAI KESEPAKATAN BALI PACKAGE DI KTM KE-9 WTO 2011-2013

Bab ini akan membahas mengenai diplomasi Indonesia dalam keberhasilan menyepakati *Bali Package* di KTM WTO ke-9 di Bali.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN